



Fujitsu Way Code of Conduct
Global Business Standards

shaping tomorrow with you



Isi

Fujitsu Way.....	3
Fujitsu Way dan Global Business Standards.....	3
Perspektif Global	4
Compliance di dalam Fujitsu.....	5
Mengapa kita memerlukan Global Business Standards?	5
Apa sajakah kewajiban kita dalam kaitannya dengan Global Business Standards?	5
Bagaimana kesesuaian Global Business Standards dengan kebijakan lainnya?.....	6
Bagaimana kesesuaian Global Business Standards dengan hukum setempat?.....	6
Memantau Kepatuhan dan Penerapan Global Business Standards.....	6
Pelaporan Pelanggaran terhadap Global Business Standards dan Tidak Adanya Pembalasan.....	6
Tes Integritas	8
Global Business Standards.....	9
1 Kita menghormati hak asasi manusia	9
1.1 Menghormati hak asasi manusia	9
1.2 Diskriminasi atau pelecehan	9
1.3 Menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kepercayaan dan rasa hormat.....	9
2 Kita mematuhi semua hukum dan peraturan-perundangan	10
2.1 Menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan	10
2.2 Laporan Keuangan dan Arsip Perusahaan.....	10
2.3 Lingkungan dan Produk	10
2.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja	10
2.5 Perdagangan Internasional	11
2.6 Pencucian Uang.....	11
3 Kita bersikap fair di dalam setiap kesepakatan usaha kita yang kita lakukan.....	11
3.1 Persaingan Sehat	11
3.2 Penyuapan.....	12
3.3 Bertransaksi dengan Pemerintah	12
3.4 Pembelian yang Wajar dan Etis.....	13
3.5 Pemasaran dan Pengiklanan	13
3.6 Kegiatan Politik dan Media	13
4 Kita melindungi dan menghormati Hak Kekayaan Intelektual	14
4.1 Melindungi HAKI Fujitsu.....	14

4.2 Menghormati HAKI Pihak Ketiga	14
5 Kita menjaga kerahasiaan	14
5.1 Prinsip Umum.....	14
5.2 Melindungi Informasi Rahasia Perusahaan.....	15
5.3 Melindungi Informasi Rahasia Pelanggan atau Pihak Ketiga	15
5.4 Menangani Data Pribadi.....	15
6 Kita tidak menggunakan posisi kita dalam organisasi untuk kepentingan pribadi	16
6.1 Prinsip Umum.....	16
6.2 Konflik Kepentingan	16
6.3 Hadiah dan Hiburan	16
6.4 Perdagangan Dengan Orang Dalam.....	17
6.5 Melindungi Aset Perusahaan.....	17
Lampiran Global Business Standards (“GBS”).....	18
Kebijakan Global tentang Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi.....	18
Kebijakan Global tentang Kepatuhan pada Undang-Undang Anti-Monopoli & Persaingan.....	21

Fujitsu Way

Fujitsu Way memberikan arahan umum untuk semua karyawan Fujitsu Group (selanjutnya disebut sebagai “Fujitsu”). Dengan berpegang pada prinsip dan nilai-nilai perusahaan, karyawan meningkatkan nilai perusahaan dan kontribusi mereka kepada masyarakat global dan masyarakat setempat.

Visi Korporat Fujitsu adalah, bahwa melalui upaya terus-menerus untuk berinovasi, kita bertujuan untuk ikut berperan menciptakan masyarakat pengguna internet yang bermanfaat dan aman, menyediakan masa depan sejahtera yang mewujudkan impian masyarakat di seluruh dunia.

Fujitsu Way dan Global Business Standards

Fujitsu yakin bahwa integritas adalah faktor penentu untuk meraih sukses berkelanjutan dalam bisnis.

Fujitsu Way mewujudkan filosofi Fujitsu, alasan keberadaannya, nilai-nilai korporatnya, serta prinsip yang mengatur transaksi bisnisnya. Fujitsu Way mencakup Tata Tertib, yang menyediakan aturan dan pedoman untuk dipatuhi oleh semua karyawan Fujitsu. Pesan yang mendukung Tata Tertib ini adalah bahwa kita akan berusaha keras menerapkan Pedoman Perilaku ini dalam setiap urusan atau perilaku berbisnis.

Global Business Standards ini adalah pengembangan lebih lanjut yang dirancang untuk menyediakan panduan bagi semua karyawan Fujitsu di seluruh dunia tentang cara kita berperilaku agar dapat:

- mencegah pelanggaran hukum
- mempertahankan standar tinggi dalam menjalankan bisnis
- melindungi reputasi Fujitsu di tingkat global.

Dengan menggunakan Global Business Standards sebagai rujukan, semua karyawan Fujitsu harus mempelajari dan mematuhi standard dan hukum yang berlaku.

Global Business Standards berlaku bagi semua karyawan Fujitsu, termasuk para direktur dan petinggi (yang secara bersama-sama disebut sebagai “karyawan” dalam Global Business Standards), serta meliputi semua pihak yang terlibat dalam bisnis Fujitsu. Semua standar ini berlaku bagi semua kegiatan bisnis kita di seluruh dunia.



Perspektif Global

Dengan semakin meningkatnya globalisasi serta dunia usaha tanpa batas, kita harus menjalankan kegiatan dari perspektif global dengan mengambil posisi sebagai pemain global sesungguhnya.

Ungkapan “Berpikir Global, Bertindak Lokal” merangkum visi kita untuk menjadi perusahaan trans-nasional terdepan. Kesuksesan mengharuskan kita menjalankan kegiatan bisnis dari perspektif global sambil tetap tanggap akan kebutuhan pasar lokal.

Filosofi ini membawa pendekatan kita kepada kepatuhan, pelaksanaan yang sesuai dengan standar. Global Business Standards memberi panduan umum sebagai tuntunan untuk seluruh karyawan Fujitsu. Secara regional akan dibuat kebijakan dan program-program untuk memastikan bahwa implementasi prinsip-prinsip Global Business Standards secara efektif dapat terlaksana. Tentu saja dengan tetap mencerminkan karakteristik dalam tataran regional, negara maupun bidang usaha.

Compliance di dalam Fujitsu

Mengapa kita memerlukan Global Business Standards?

Salah satu prinsip mendasar Fujitsu Way adalah pemahaman terhadap ungkapan “Warga Negara Global” – kita bertindak sebagai warga global, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Karena itu, kita bertindak sebagai anggota masyarakat global yang bertanggung jawab berdasarkan ketegasan etika serta integritas. Global Business Standards dirancang untuk membantu kita mencapai tujuan itu.

Global Business Standards mengatur hubungan Fujitsu dengan pihak lain, termasuk:

- Pemegang saham
- Karyawan
- Pelanggan
- Pemasok
- Pemerintah
- Perusahaan lain (termasuk pesaing kita)
- Lingkungan
- Masyarakat

Global Business Standards:

- Memberikan panduan tentang bagaimana seharusnya karyawan Fujitsu berperilaku
- Dirancang untuk memastikan bahwa reputasi baik Fujitsu dipertahankan
- Dimaksudkan untuk mencegah agar Fujitsu, karyawannya, dan semua pihak yang berhubungan dengan kita tidak masuk ke dalam situasi yang fatal atau membahayakan

Dalam lingkungan korporasi dan peraturan / perundangan yang secara konstan berubah, bertindak dengan integritas dan tanggung jawab memerlukan perhatian lebih besar, dan Global Business Standards serta kebijakan tentang kepatuhan yang terkait dirancang untuk membantu kita semua melakukannya.

Apa sajakah kewajiban kita dalam kaitannya dengan Global Business Standards?

Global Business Standards berlaku bagi semua karyawan Fujitsu, termasuk para direktur dan pemegang jabatan di perusahaan, serta semua pihak yang terikat dengan kegiatan usaha Fujitsu.

Kita semua harus:

- Mempelajari dan memahami Global Business Standards serta menerapkan dalam setiap peran dan pekerjaan kita
- Berusaha memahami semua hukum dan peraturan relevan yang berlaku dalam setiap tugas dan tanggungjawab kita
- Berusaha dalam segala aspek pekerjaan, selalu mematuhi hukum serta peraturan itu
- Mengkomunikasikan kepada rekan sejawat bagaimana Global Business Standards dan kebijakan itu diaplikasikan dalam pekerjaan kita sehari-hari
- Mencari kesempatan untuk mendiskusikan dan memecahkan situasi-situasi sulit serta permasalahan etika dengan rekan sejawat
- Tidak meminta atau memaksa orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri dilarang melakukannya
- Mengetahui batas wewenang kita dan tidak melakukan tindakan yang melampaui batas tersebut

Para pengelola bidang penyeliaan juga harus:

Global Business Standards V2.0

- mendukung lingkungan kerja yang mengakui, menghargai, dan mencontohkan perilaku etis
- memastikan bahwa karyawan dan tim memahami dan mematuhi prinsip Panduan Global
- memantau dan secara konsisten menerapkan Global Business Standards
- memastikan bahwa pihak ketiga yang kita bimbing memahami kewajiban mereka untuk patuh

Bagaimana kesesuaian Global Business Standards dengan kebijakan lainnya?

Global Business Standards tidak dapat menguraikan secara terperinci setiap kebijakan, standar atau kebiasaan yang berlaku di Fujitsu. Global Business Standards menyediakan satu kerangka kerja untuk kebijakan yang lebih terperinci, yang dikembangkan di tingkat Global dan Regional agar bisa mencakup berbagai aspek Global Business Standards secara lebih terperinci.

Semua kebijakan dan prosedur harus sesuai dengan prinsip Global Business Standards dan tidak akan melepaskan prinsip-prinsipnya atau melemahkannya. Jika terjadi pertentangan antara kebijakan Regional atau kebijakan Lokal dengan Global Business Standards maka prinsip dalam Global Business Standards yang berlaku.

Bagaimana kesesuaian Global Business Standards dengan hukum setempat?

Fujitsu menjalankan kegiatan usahanya di seluruh dunia. Seluruh karyawan Fujitsu wajib mematuhi hukum dan peraturan di berbagai negara berbeda.

Global Business Standards menetapkan standar minimum yang dipersyaratkan di seluruh bagian Fujitsu, di mana pun kita ditempatkan. Apabila hukum atau peraturan setempat menetapkan standar lebih rendah daripada yang dipersyaratkan oleh Global Business Standards, maka standar yang lebih tinggi pada Global Business Standards yang berlaku. Jika hukum setempat mensyaratkan standar lebih tinggi daripada Global Business Standards, kita harus mematuhi standar yang lebih tinggi itu.

Memantau Kepatuhan dan Penerapan Global Business Standards

Fujitsu menggunakan sejumlah mekanisme yang berbeda untuk memantau kepatuhan pada Global Business Standards. Hal tersebut meliputi:

- Sistem pengelolaan risiko
- Pemeriksaan kepatuhan
- Kampanye kesadaran yang lebih giat tentang masalah kepatuhan sehingga pelanggaran lebih mudah dikenali dan dilaporkan
- Mendorong penggunaan mekanisme yang sesuai (termasuk “Fujitsu Alert”) untuk melaporkan masalah dan keprihatinan tentang kepatuhan

Apabila keprihatinan tentang masalah kepatuhan disampaikan, maka pemeriksaan dan penyelidikan akan dilakukan untuk menemukan fakta yang diperlukan serta menyusun rekomendasi untuk tindakan selanjutnya.

Semua orang yang bekerja di Fujitsu atau yang mewakilinya harus memahami bahwa tidak mematuhi Global Business Standards dapat berakibat kepada dikenakannya tindakan pendisiplinan atau sanksi.

Pelaporan Pelanggaran terhadap Global Business Standards dan Tidak Adanya Pembalasan

Semua karyawan Fujitsu dan semua pihak yang terlibat dalam bisnis Fujitsu dianjurkan untuk melaporkan pelanggaran atau potensi pelanggaran Global Business Standards yang mereka ketahui.

Laporan tentang pelanggaran kepatuhan yang sudah terjadi atau diduga terjadi dapat disampaikan dengan berbagai cara, termasuk:

- Kepada Senior Manager
- Kepada anggota Legal Department
- Kepada anggota HR Department
- Kepada anggota Internal Audit Department
- Melalui prosedur pengaduan lokal
- Melalui “Fujitsu Alert” - Saluran eksternal Pelaporan Karyawan atau proses Web Reporting

Jika tidak yakin dengan tindakan apa yang harus Anda lakukan, Anda harus meminta nasihat dari Senior Manager atau Legal Department.

Amatlah penting bagi program kepatuhan Fujitsu bahwa karyawan dapat melaporkan pelanggaran kepatuhan yang sudah terjadi atau sekedar dugaan tanpa takut mendapatkan pembalasan. Fujitsu tidak akan mentolerir perlakuan buruk terhadap karyawan yang dengan niat baik telah melaporkan masalah atau kekhawatiran. Pembalasan itu sendiri dianggap pelanggaran sangat berat terhadap Global Business Standards.

Tes Integritas



Apabila Anda tidak yakin apakah harus mengambil keputusan atau tindakan, uji Tes Integritas di atas dapat membantu memandu Anda. Namun, jika masih tetap tidak yakin setelah menerapkan uji ini, Anda harus meminta nasihat dari Compliance atau Legal Department.

Global Business Standards

1 Kita menghormati hak asasi manusia

1.1 Menghormati hak asasi manusia

Fujitsu Group (selanjutnya disebut sebagai “Fujitsu”) mendukung perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Kita menghormati martabat pribadi dan hak setiap orang.

Misalnya, Fujitsu tidak akan:

- Mempekerjakan orang yang tidak ingin bekerja
- Secara sadar menggunakan atau mentoleransi pekerja anak
- Secara sengaja melanggar undang-undang tenaga kerja di negara tempatnya berbisnis.

1.2 Diskriminasi atau pelecehan

Tenaga kerja kita terdiri atas pria dan wanita dari berbagai bangsa, budaya, agama, dan karakteristik pribadi lainnya. Keragaman karyawan kita merupakan kekuatan utama.

Kita tidak akan secara tidak adil melakukan diskriminasi berdasarkan karakteristik pribadi seperti ras, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, usia, status sosial, asal-usul keluarga, cacat tubuh atau mental, atau orientasi seksual, dan bahkan juga tidak akan mentoleransi diskriminasi semacam itu.

Kita tidak akan mentoleransi pelecehan berdasarkan karakteristik pribadi atau yang terjadi akibat penyalahgunaan wewenang atau kontrol, yang berdampak buruk pada martabat seseorang.

Keputusan untuk mempekerjakan seseorang didasarkan pada kriteria pekerjaan (pendidikan, kualifikasi dan pengalaman) dan pada kepatutan (keterampilan dan kinerja).

1.3 Menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kepercayaan dan rasa hormat

Fujitsu berkomitmen untuk memelihara tempat kerja yang didasarkan pada sikap saling menghormati, kepercayaan, dan praktek perekrutan tenaga kerja yang adil. Kita percaya bahwa setiap orang berhak diperlakukan dengan adil, baik, dan dihormati.

Para manajer diharapkan untuk:

- Bersikap proaktif dan mendorong komunikasi yang terbuka
- Menunjukkan keteladanan perilaku dan kinerja
- Menunjukkan keterbukaan dan kejujuran
- Menetapkan sasaran yang jelas dan realistis, memberikan karyawan tanggung jawab dan wewenang yang sesuai
- Mudah dihubungi / ditemui oleh karyawan
- Menciptakan lingkungan yang selalu mematuhi Global Business Standards, dan karyawan merasa nyaman untuk mengemukakan masalah
- Melaporkan pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran dan mendorong orang lain melakukannya

Lingkungan kerja harus bebas dari pelecehan atau perilaku lain yang menyebabkan terciptanya lingkungan kerja yang tidak ramah. Ancaman, intimidasi atau kekerasan tidak ditoleransi di tempat kerja atau dalam setiap kegiatan terkait-pekerjaan di luar tempat kerja.

2 Kita mematuhi semua hukum dan peraturan-perundangan

2.1 Menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan

Kita akan menghormati dan taat kepada semua hukum, perjanjian, serta peraturan dan statuta pemerintah yang berlaku. Pelanggaran hukum atau peraturan tidak dapat diterima, meskipun dimotivasi oleh pengabdian kepada Fujitsu.

Kita akan berusaha memahami semua hukum dan peraturan terkait yang mempengaruhi bisnis kita dan berupaya memastikan bahwa kita tidak melanggar hukum tersebut melalui tindakan-perbuatan kita.

Kita juga akan berusaha memahami dan mematuhi kebiasaan lokal setempat dan praktek dunia usaha yang diterima masyarakat apabila hal ini dipandang sesuai dengan Global Business Standards, tidak melanggar hukum serta adil.

Kita akan bekerja sama dengan pejabat pemerintah serta jujur dan akurat dalam penyelidikan atau pemeriksaan.

2.2 Laporan Keuangan dan Arsip Perusahaan

Pemegang saham, analis, pelanggan, kreditor, dan banyak pihak lain mengandalkan Fujitsu untuk dapat menyediakan informasi yang dapat dipercaya menyangkut kegiatan, kinerja, serta proyeksi / harapan ke depan Fujitsu. Integritas dalam pengelolaan arsip dan pelaporan keuangan sangat penting bagi kredibilitas kita dan diperlukan untuk mencegah penyimpangan atau bahkan kejahatan keuangan.

Semua catatan dan laporan yang dihasilkan di lingkungan Fujitsu harus akurat dan sesuai dengan kenyataan. Ini berlaku juga pada catatan dan laporan yang dihasilkan untuk keperluan internal serta yang diterbitkan atau didistribusikan secara eksternal.

2.3 Lingkungan dan Produk

Melindungi lingkungan dan melestarikan sumber daya alam merupakan target dengan prioritas tinggi bagi Fujitsu. Untuk mencapai sasaran ini, sistem pengelolaan lingkungan kita harus memenuhi standar teknis yang sesuai dan mematuhi semua hukum dan peraturan-perundangan terkait.

Kita melakukan tindakan pencegahan dalam menyikapi permasalahan lingkungan dan berupaya memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga lingkungan. Misalnya,

- Implementasi proyek Green Policy Innovation kita secara global bertujuan untuk mengurangi emisi CO2 dunia.
- Dalam pengembangan produk, persyaratan utamanya adalah rancangan teknis yang ramah lingkungan, keselamatan dari segi teknis, dan perlindungan kesehatan
- Daur ulang dan pelestarian energi juga menjadi faktor kunci dalam Fujitsu menjalankan usaha.

Semua produk kita akan diproduksi sesuai dengan standar teknis, keselamatan, dan lingkungan, serta mematuhi peraturan terkait dan persyaratan izin.

2.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Fujitsu berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan menjaga kesehatan, serta menerapkan ukuran pencegahan kecelakaan kerja yang sesuai. Kita semua wajib mematuhi kebijakan tentang kesehatan, keselamatan kerja, dan keamanan, dan segala masalah yang menyangkut kesehatan-keselamatan kerja harus dilaporkan.

Ketika berada di kawasan Fujitsu atau ketika menjalankan kegiatan usaha Fujitsu, kita tidak akan:

- Memiliki atau menjual obat terlarang
- Terlibat dalam penggunaan obat terlarang
- Mabuk karena mengonsumsi obat atau alkohol

Ini berlaku pada perancangan tempat kerja, perlengkapan, dan proses kerja, selain juga pengelolaan keselamatan dan perilaku karyawan di tempat kerja.

Kita semua harus bertanggung jawab secara pribadi untuk kesehatan dan keselamatan masing-masing, rekan kerja kita, dan semua pihak yang terpengaruhi oleh kegiatan bisnis Fujitsu.

2.5 Perdagangan Internasional

Impor dan ekspor produk dan layanan sangat rumit peraturannya. Beberapa produk, layanan, perangkat lunak, dan informasi tidak dapat dipasok atau diekspor ke sejumlah negara atau pelanggan, atau untuk pengguna-akhir tertentu. Melanggar kontrol perdagangan dapat mengakibatkan sanksi sangat berat, termasuk denda dan bahkan hukuman penjara bagi pelakunya.

Fujitsu mengikuti perkembangan dan mendukung semua hukum dan peraturan yang mengatur cara perusahaan memasok produk, layanan, perangkat lunak, dan informasi

2.6 Pencucian Uang

Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kriminal seperti terorisme, narkoba, penyuapan, dan pemalsuan mungkin berusaha melakukan “pencucian” uang yang diperoleh dari kejahatan itu untuk menyembunyikannya atau agar terkesan sah. Banyak negara sekarang memiliki undang-undang pencucian uang yang melarang dilakukannya kegiatan yang menghasilkan pendapatan dari kegiatan kriminal dan mengharuskan penjagaan untuk mencegah pencucian uang yang tidak dikehendaki itu.

Fujitsu berkomitmen untuk mematuhi semua undang-undang pencucian uang dan anti-terorisme serta melaksanakan bisnis hanya dengan pelanggan yang reputasinya baik yang melakukan kegiatan bisnis yang sah.

3 Kita bersikap fair di dalam setiap kesepakatan usaha kita yang kita lakukan

3.1 Persaingan Sehat

Hukum persaingan atau anti-monopoli dirancang untuk melindungi persaingan bebas dan sehat serta memastikan bahwa kepentingan terbaik para pelanggan diperhatikan. Hukum ini berlaku di setiap negara tempat Fujitsu menjalankan usahanya, dan beberapa undang-undang berlaku secara lintas batas.

Fujitsu mengikuti praktek persaingan sehat dan sah menurut hukum, serta mematuhi semua undang-undang persaingan atau anti-monopoli yang berlaku, di manapun usaha itu dijalankan.

Anti-monopoli dapat merupakan bidang yang rumit, dan sebagaimana semua hal yang menyangkut hukum, saran dari Legal Department harus diminta jika ada keraguan atau kekhawatiran. Contoh yang sering mengindikasikan perilaku anti-persaingan adalah:

- Menyepakati perjanjian dengan para pesaing tentang harga penjualan
- Menyepakati harga penjualan barang dan jasa Fujitsu yang ditetapkan oleh para reseller
- Sepakat untuk tidak bersaing

- Mendiskusikan tender dengan perusahaan peserta tender lainnya (bid rigging)
- Ikut serta dalam penetapan jatah pasar (sepakat untuk menetapkan jatah pelanggan atau kelompok pelanggan tertentu, atau wilayah geografi tertentu, misalnya)
- Menyepakati volume produksi atau penjualan
- Menjual barang atau jasa dengan harga lebih rendah daripada harga pasar untuk menggoyang persaingan (dumping)

Perilaku anti-persaingan memiliki konsekuensi yang sangat berat, misalnya:

- Di Uni Eropa, denda bisa mencapai 10% dari omzet global
- Hukuman penjara untuk orang yang ditetapkan bersalah melakukan pelanggaran
- Tidak diikutsertakan dalam kontrak dengan pemerintah
- Rusaknya reputasi
- Dampak sangat buruk yang menyangkut kemampuan perusahaan mendapatkan kontrak di kemudian hari

Sangat penting jika setiap kemungkinan pelanggaran prinsip persaingan sehat segera disampaikan ke Legal Department atau Senior Management (atau melalui Saluran “Fujitsu Alert” jika perlu). Banyak negara menjalankan program yang lebih longgar yang dapat menyebabkan pengurangan denda untuk pelanggaran yang secara sukarela diberitahukan kepada pihak berwenang.

3.2 Penyuapan

Fujitsu bersaing berdasarkan kualitas dan harga dari produk, jasa, serta solusi yang ditawarkannya. Tidak seorang pun di lingkungan Fujitsu, atau yang bertindak mewakili Fujitsu, boleh memberikan atau menerima, secara langsung atau tidak langsung, suap dalam bentuk apa pun. “Suap” berarti segala keuntungan, baik dalam bentuk uang ataupun bentuk lain.

Melakukan pembayaran tidak semestinya untuk mendapatkan keuntungan tidak pernah dibenarkan di Fujitsu, dapat menyebabkan seseorang maupun Perusahaan terkena tuntutan pidana.

Semua hal berikut ini dapat dianggap sebagai suap atau pembayaran tidak semestinya:

- Memberikan atau menjanjikan uang, barang, atau layanan kepada pejabat pemerintah atau karyawan dari pelanggan
- Membayar sejumlah uang kepada pejabat atau karyawan untuk mempercepat urusan administrasi
- Pembayaran komisi yang tidak sebanding dengan layanan yang diberikan

Kita harus sangat berhati-hati saat berurusan dengan pejabat pemerintah; di banyak negara, hadiah atau pembayaran kepada pejabat pemerintah secara khusus dilarang oleh undang-undang. Beberapa negara juga memberlakukan undang-undang tersebut kepada pejabat pemerintah asing di mancanegara.

Setiap orang yang menjalankan usaha melalui konsultan, perantara, atau pihak ketiga lainnya harus berusaha memastikan bahwa mereka juga mematuhi peraturan di atas.

3.3 Bertransaksi dengan Pemerintah

Fujitsu melakukan usaha dengan perusahaan nasional dan perusahaan milik pemerintah. Dalam pekerjaan yang kita jalankan, kita sering berinteraksi dengan badan atau pejabat pemerintah. Dalam setiap kejadian, karyawan Fujitsu harus menerapkan standar etika tertinggi dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Pada khususnya, kita harus:

- Mematuhi persyaratan hukum dan peraturan yang secara khusus biasa diterapkan dalam transaksi dengan pemerintah
- Jujur dan akurat ketika berurusan dengan pejabat dan badan pemerintah
- Memastikan bahwa laporan, sertifikasi, pernyataan, dan proposal bersifat mutakhir, akurat dan lengkap
- Memastikan bahwa persyaratan kontrak diidentifikasi dan dipahami secara benar, dan bahwa pada dasarnya kita tidak menyimpang dari persyaratan kontrak tanpa persetujuan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang
- Menghindari pembebanan biaya yang tidak benar atau di luar kewenangan dalam kontrak dengan pemerintah
- Khususnya berhati-hati ketika berurusan dengan pemerintah asing, atau pemerintah negara sedang berkembang, yang mungkin kita belum memahami sepenuhnya

Jika berhubungan dengan pejabat pemerintah atau pihak berwenang, nasihat harus diminta dari Legal Department.

3.4 Pembelian yang Wajar dan Etis

Para pemasok Fujitsu dalam bidang kemampuan masing-masing berperan sangat penting dalam kegiatan usaha serta penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan. Kinerja etis para pemasok Fujitsu dicermati oleh para pemegang saham kita, dan dapat berpengaruh langsung pada reputasi Fujitsu. Setiap kegagalan pemasok dalam memenuhi standar kita dapat mengacaukan tujuan kita sendiri dalam hal kepatuhan dan integritas kita dalam kegiatan usaha.

Kita memilih pemasok dengan hati-hati berdasarkan kriteria yang sesuai seperti jasa dan harga, tetapi juga berdasarkan kemampuan mereka mematuhi semua persyaratan hukum terkait. Kita juga mengharapkan para pemasok bertindak sesuai dengan prinsip dan standar dalam Global Business Standards.

Kita juga memastikan bahwa Fujitsu tidak memperlakukan pemasok secara tidak adil atau mementingkan pemasok skala besar daripada pemasok kecil.

3.5 Pemasaran dan Pengiklanan

Reputasi Fujitsu sangat berharga dan dicapai setelah bertahun-tahun memberikan layanan istimewa dan menegakkan integritas dalam kegiatan usahanya. Untuk mempertahankan reputasi ini, semua kegiatan pemasaran, pengiklanan, dan penjualan harus memaparkan segala yang ditawarkan serta jasa kita secara sah dan adil. Dilarang melakukan praktek yang keliru, menyesatkan, atau mengelabui.

Merek dan merek dagang Fujitsu harus digunakan secara konsisten, secara legal, dan sesuai dengan kebijakan perusahaan

3.6 Kegiatan Politik dan Media

Hukum di negara tertentu menetapkan pembatasan ketat tentang kontribusi perusahaan kepada partai politik atau calon pejabat. Pelanggaran dapat menyebabkan sanksi berat, termasuk denda atau hukuman penjara. Hal itu juga dapat mempengaruhi reputasi Fujitsu yang dipandang mendukung partai politik tertentu.

Kita tidak diperbolehkan memberikan kontribusi secara langsung atau tidak langsung kepada calon pejabat, pejabat pemerintah, atau partai politik atas nama Fujitsu, kecuali jika diizinkan secara tertulis oleh

manajemen tingkat senior.

Kita tidak boleh berbicara kepada media atau memberikan pernyataan atas nama Fujitsu, kecuali jika diizinkan oleh Public Relation.

4 Kita melindungi dan menghormati Hak Kekayaan Intelektual

4.1 Melindungi HAKI Fujitsu

Kekayaan intelektual Fujitsu adalah aset berharga dan sumber daya manajemen yang penting yang menunjang kegiatan usaha dan kepercayaan pelanggan kepada kita.

Kita berusaha keras untuk memperoleh dan menjaga semua hak kekayaan intelektual, termasuk paten, hak cipta, dan merek dagang, serta menggunakan semua itu dengan efektif dalam mengembangkan bisnis kita.

Pada khususnya, kita harus:

- Mengidentifikasi dan melindungi kekayaan intelektual Fujitsu
- Mematuhi semua kebijakan Fujitsu yang menyangkut perlindungan kekayaan intelektual
- Berkonsultasi dengan Legal Department sebelum mengungkapkan informasi milik Fujitsu kepada pihak lain atau memperbolehkan pihak lain menggunakan kekayaan intelektual Fujitsu.

4.2 Menghormati HAKI Pihak Ketiga

Penggunaan kekayaan intelektual pihak lain tanpa izin dapat menyebabkan Fujitsu (dan karyawan Fujitsu) menghadapi tuntutan hukum perdata dan ganti rugi, termasuk denda besar dan sanksi pidana.

Kita menghormati kekayaan intelektual pihak ketiga dan menggunakannya hanya setelah mendapatkan izin yang benar-benar pasti untuk menggunakannya.

Pada khususnya, kita harus:

- Menghormati materi yang dilindungi hak ciptanya secara sah serta kekayaan intelektual pihak lain
- Berkonsultasi dengan Legal Department jika menyangkut lisensi atau persetujuan yang mungkin diperlukan untuk menggunakan kekayaan intelektual pihak lain
- Menerapkan mekanisme kontrol untuk menghindari kelalaian dalam pengungkapan informasi milik perusahaan di mana seorang karyawan bekerja sebelumnya
- Menghormati Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak ketiga yang diberikan untuk keperluan terbatas menurut Non-Disclosure Agreement (lihat juga Pasal 5.3).

5 Kita menjaga kerahasiaan

5.1 Prinsip Umum

Penanganan informasi dengan baik sangat penting bagi kegiatan usaha kita. Kecerobohan yang menyebabkan hilangnya atau bocornya informasi dapat menyebabkan kerugian besar dan hancurnya reputasi. Kita harus mematuhi Fujitsu Global Information Security Policy (yang diterbitkan oleh Fujitsu IT Strategies Unit), dan aturan terkait untuk penanganan berbagai jenis informasi. Selain itu, kita mempunyai kesadaran akan pentingnya keamanan data dalam pekerjaan kita sehari-hari sehingga tidak boleh secara sengaja menghilangkan atau membocorkan informasi rahasia atau data pribadi.

5.2 Melindungi Informasi Rahasia Perusahaan

Informasi Fujitsu yang kita akses dalam pekerjaan sehari-hari bersifat rahasia. Pemahaman ini amat penting dalam keberhasilan usaha kita. Informasi rahasia meliputi informasi tentang kegiatan usaha, harga, riset dan pengembangan, produk, manufaktur, sumber daya manusia, angka laporan internal, dan juga know-how.

Kita harus:

- Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengamankan dan melindungi informasi rahasia Fujitsu
- Memastikan bahwa kita tidak mengungkapkan informasi seperti itu kepada orang lain di luar perusahaan tanpa mengikuti prosedur yang benar (misalnya memastikan adanya perjanjian kerahasiaan)
- Menggunakan informasi rahasia Fujitsu hanya untuk keperluan bisnis Fujitsu
- Membuat catatan, salinan, atau database informasi Fujitsu hanya bila benar-benar diperlukan secara langsung untuk kepentingan bisnis Fujitsu
- Menghormati dan melindungi informasi rahasia Fujitsu, bahkan juga setelah masa kerja dengan Fujitsu berakhir

5.3 Melindungi Informasi Rahasia Pelanggan atau Pihak Ketiga

Informasi dari pelanggan atau mitra bisnis harus ditangani dan digunakan dengan semestinya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan dan ditetapkan dalam setiap kontrak dengan mereka, termasuk syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan yang dimaksudkan, pengelolaan, dan masa berlakunya kerahasiaan informasi tersebut.

Maka dari itu kita menangani informasi pihak ketiga dengan semestinya sepanjang waktu dan tidak melanggar kewajiban dalam kontrak untuk menjaga kerahasiaan.

5.4 Menangani Data Pribadi

Fujitsu berkomitmen untuk melindungi data pribadi milik karyawan, pelanggan, pemasok, dan pihak lain sesuai dengan hukum setempat. Saat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi untuk keperluan apa pun, kita menangani, mengelola, dan menggunakan data pribadi tersebut dengan semestinya dan sesuai dengan semua hukum dan peraturan terkait.

Pada khususnya, kita akan:

- Berusaha mempelajari dan memahami hukum dan peraturan yang berkaitan dengan data pribadi yang mempengaruhi kegiatan kerja kita
- Memahami dan mematuhi kebijakan Regional tentang perlindungan data
- Mengumpulkan, menggunakan, dan mengolah data pribadi hanya untuk keperluan bisnis yang sah
- Menggunakan data anonim, bukan data pribadi apabila itu lebih baik
- Membatasi akses data pribadi hanya bagi mereka yang memerlukan untuk keperluan bisnis yang sah
- Berupaya mencegah kehilangan atau kerusakan data pribadi secara tidak sengaja
- Segera bertindak jika mengetahui ada pelanggaran atau hilangnya data personal
- Mengawasi seandainya kontrol data personal tidak memadai
- Mengalihkan data pribadi dari satu negara ke negara lain dengan mematuhi hukum serta menjaga keamanan data semestinya

6 Kita tidak menggunakan posisi kita dalam organisasi untuk kepentingan pribadi

6.1 Prinsip Umum

Kita tidak diperkenankan untuk menggunakan posisi kita, peran kita, informasi perusahaan, fasilitas atau aset perusahaan, atau bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kewajiban kita di perusahaan, untuk mencari atau mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, kerabat, teman, atau pihak ketiga lainnya.

6.2 Konflik Kepentingan

Semua karyawan atau yang bekerja mewakili Fujitsu harus memastikan bahwa semua yang mereka lakukan, baik di tempat kerja ataupun di luar, tidak berbenturan dengan tanggung jawab mereka di Fujitsu. Kita semua harus berupaya menghindari situasi yang menyebabkan kepentingan kita mengganggu kemampuan kita untuk mengambil keputusan yang tidak bias atas nama Fujitsu. Bahkan kesan adanya konflik kepentingan bisa berakibat buruk. Apabila potensi konflik tidak bisa dihindari, hal itu harus ditangani dengan hati-hati.

Hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- Kegiatan bisnis di luar atau kepentingan keuangan yang dapat menimbulkan konflik, atau mengesankan ada konflik
- Penggunaan waktu kerja, sumber daya atau fasilitas Fujitsu untuk kegiatan selain bisnis Fujitsu (termasuk kegiatan masyarakat, kegiatan amal atau nirlaba, yang selalu mengharuskan adanya izin dari atasan langsung)
- Memetik keuntungan pribadi dengan memanfaatkan peluang yang ditemukan atau diperoleh melalui pekerjaan di Fujitsu
- Menerima posisi penting atau direktur di perusahaan lain (meskipun di organisasi nirlaba, yang mungkin memerlukan atau mengharapkan dukungan dari Fujitsu)
- Hadiah, diskon, atau hiburan yang ditawarkan oleh pelanggan atau calon pelanggan
- Berurusan dengan perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh teman atau keluarga
- Mempekerjakan, mempromosikan, atau secara langsung menyelia anggota keluarga atau teman dekat

Semua karyawan harus secara proaktif menyampaikan kepada atasannya jika ada konflik yang nyata, dan bekerja sama dengan atasan untuk mendiskusikan, mendokumentasikan, dan menangani konflik tersebut secara efektif.

Kita tidak boleh terlibat dalam kegiatan di luar pekerjaan yang dapat merusak reputasi Fujitsu. Misalnya, kita tidak boleh menayangkan pesan tidak patut tentang Perusahaan di papan pengumuman online atau situs jejaring.

6.3 Hadiah dan Hiburan

Karyawan harus memastikan bahwa mereka benar-benar mengetahui dan memahami Regional Gifts and Entertainment Policy sebelum

- Memberikan atau menerima hadiah,
- Menikmati hiburan dari pelanggan, atau
- Memberikan atau menerima keuntungan lainnya

Untuk hadiah atau keuntungan bernilai kecil yang wajar dan dapat diterima menurut kebijakan Regional, karyawan boleh menerimanya, asalkan sudah ada persetujuan dari atasan.

Jika ada kemungkinan bahwa hadiah, hiburan, atau keuntungan lain itu dapat menciptakan kesan tidak patut, maka hal itu tidak boleh ditawarkan, atau harus ditolak dengan sopan.

6.4 Perdagangan Dengan Orang Dalam

Undang-undang tentang Perdagangan Dengan Orang Dalam melarang pembelian dan penjualan saham perusahaan, berdasarkan informasi penting yang tidak tersedia bagi publik. Fujitsu berkomitmen untuk mendukung pasar saham secara adil dan terbuka di seluruh dunia.

Semua karyawan atau yang bekerja atas nama Fujitsu tidak diperbolehkan memperdagangkan saham atau sekuritas lain dengan menggunakan informasi “orang dalam” yang belum diungkapkan ke publik, yang diperoleh karena mereka bekerja di Fujitsu atau dari pihak ketiga. Informasi itu juga tidak boleh diungkapkan kepada orang lain.

Untuk mematuhi prinsip ini:

- Dilarang membeli atau menjual saham perusahaan apa pun (termasuk Fujitsu) baik secara langsung ataupun melalui orang lain, atas informasi orang dalam perusahaan itu
- Tidak memberikan rekomendasi atau saran kepada orang lain berdasarkan informasi orang dalam
- Informasi Perusahaan harus dirahasiakan

6.5 Melindungi Aset Perusahaan

Aset Fujitsu disediakan untuk membantu mencapai sasaran bisnis. Aset perusahaan yang rusak, dicuri, disalahgunakan, atau disia-siakan berdampak negatif pada kinerja operasional dan keuangan Fujitsu, dan karena itu juga berdampak pada kita secara perorangan.

Kita tidak boleh menggunakan, menjual, menyewakan, atau membuang aset perusahaan, termasuk perangkat lunak, perangkat keras, atau perlengkapan atau fasilitas lain untuk keperluan apa pun selain melakukan transaksi atau menjalankan bisnis Fujitsu.

Aset perusahaan harus digunakan hanya untuk keperluan bisnis yang sah. Dilarang keras menggunakan perlengkapan atau sistem perusahaan untuk mengakses, mengambil, atau mengirimkan materi yang tidak patut atau tidak senonoh. Kebijakan TI lokal merinci lebih lanjut dan semua karyawan wajib untuk memastikan bahwa mereka sadar dan paham atas kebijakan TI yang relevan.

Lampiran Global Business Standards (“GBS”)

Lampiran ini melengkapi Bagian 3.2 (“Penyuapan”) dan 3.1 (“Persaingan Sehat”) di GBS dan merupakan bagian tak terpisahkan dari GBS. Kecuali jika dinyatakan lain, semua ketentuan dalam GBS berlaku pada Lampiran ini.

Kebijakan Global tentang Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi

1. Pembayaran Terlarang

Fujitsu bersaing berdasarkan mutu dan harga produk, layanan, dan solusi yang ditawarkannya. Tidak seorang pun di lingkungan Fujitsu, atau yang bertindak mewakili Fujitsu, boleh memberikan atau menerima, secara langsung atau tidak langsung, suap dalam bentuk apa pun. “Suap” berarti keuntungan, baik dalam bentuk uang ataupun bentuk lain.

Melakukan pembayaran tidak semestinya untuk mendapatkan keuntungan tidak pernah dibenarkan di Fujitsu, dan menyebabkan perorangan dan Perusahaan bisa dituntut karena melakukan tindakan kriminal. Banyak negara mengadopsi hukum yang melarang penyuapan oleh perusahaan, sesuai dengan standar anti-korupsi yang disepakati secara internasional. Sebagian dari hukum ini, seperti Undang-Undang Penyuapan Inggris dan Undang-Undang praktek Korupsi Asing A.S., diterapkan di seluruh dunia dan diberlakukan dengan gencar.

Semua hal berikut ini dapat dianggap sebagai suap atau pembayaran tidak semestinya, meski ini bukan daftar lengkap, setiap potensi suap harus dipertimbangkan dalam situasinya sendiri untuk menentukan apakah dilarang menurut kebijakan ini:

- Memberikan atau menjanjikan uang, barang, atau layanan kepada pejabat pemerintah atau karyawan pelanggan
- Membayar sejumlah uang kepada pejabat atau karyawan untuk mempercepat urusan administrasi
- Pembayaran komisi atau biaya yang tidak sebanding dengan layanan yang diberikan
- Hiburan, kemurahan tangan, atau hadiah dalam jumlah banyak atau berlebihan
- Kontribusi untuk partai, calon, atau kampanye politik
- Sumbangan amal kepada organisasi yang berkaitan dengan, atau atas permintaan, pejabat atau pelanggan pemerintah

Situasi tertentu dapat merupakan tanda peringatan bahwa suatu pembayaran tidak semestinya dilakukan, dan mengharuskan kita lebih berhati-hati untuk memastikan tidak dilakukan suap atau pembayaran tidak semestinya. Hal-hal berikut ini adalah contoh situasi tersebut:

- Kita berbisnis di negara yang memiliki reputasi untuk korupsi.
- Ada konsultan, agen, atau pihak ketiga lain meminta biaya sangat besar atau kenaikan biaya dari yang sudah disepakati sebelumnya untuk menuntaskan transaksi.
- Reputasi konsultan, agen, atau pihak ketiga lain dipertanyakan.
- Kita diminta melakukan pembayaran kepada perorangan, di negara lain, kepada rekening bank tertentu, atau membayar tunai.
- Kita diminta memberikan kontribusi politik atau sumbangan amal atau menggunakan subkontraktor tertentu.
- Pembayaran, hadiah, atau hiburan tampaknya dapat memengaruhi objektivitas si penerima.
- Pembayaran, hadiah, atau hiburan tidak tampak memiliki kepentingan bisnis atau mungkin tampak

lebih kepada kepentingan pribadi.

- Kita pasti malu jika pembayaran, hadiah, atau hiburan itu diketahui umum.

2. Pejabat Pemerintah

Kita harus sangat berhati-hati saat berurusan dengan pejabat pemerintah; di banyak negara, hadiah atau pembayaran kepada pejabat pemerintah secara khusus dilarang oleh undang-undang. Beberapa negara juga memberlakukan undang-undang tersebut kepada pejabat pemerintah asing di mancanegara.

Yang berikut ini adalah contoh pejabat pemerintah menurut undang-undang anti-korupsi di sejumlah negara tempat Fujitsu berbisnis:

- Karyawan perusahaan milik pemerintah
- Karyawan perusahaan yang terdaftar di bursa, yang dikendalikan atau dimiliki secara signifikan oleh pemerintah
- Dosen perguruan tinggi negeri
- Dokter atau perawat di fasilitas perawatan kesehatan yang dijalankan pemerintah
- Anggota keluarga pejabat publik
- Partai politik atau calon untuk jabatan politik
- Karyawan organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa, Bank Dunia, atau Dana Moneter Internasional

Semua hadiah kepada pejabat pemerintah dilarang, kecuali jika tidak melanggar hukum dan sudah lazim di negara tersebut, nilainya kecil, disetujui sebelumnya oleh Regional Management sesuai dengan batas kewenangan yang berlaku yang ditetapkan oleh Perusahaan. Hadiah tidak dapat diberikan dalam praktek dunia usaha setempat yang tidak memedulikan atau membenarkan penyuapan.

Pembayaran untuk pengeluaran bisnis layak yang timbul dari pejabat pemerintah (seperti biaya perjalanan, penginapan, dan makan) yang berkaitan dengan promosi, peragaan / demo, atau penjelasan produk atau service, atau dalam rangka eksekusi atau pelaksanaan suatu kontrak, mungkin dapat diperbolehkan, tetapi hanya jika jumlahnya wajar, perlu, dan disetujui sebelumnya oleh Regional Management. Pengeluaran untuk tiket pesawat kelas satu, suami atau istri dan anggota keluarga, perjalanan sampingan, kegiatan santai, tunjangan, dan pembelanjaan sejumlah uang tidak dianggap sebagai wajar maupun perlu.

3. Persyaratan Akuntansi dan Pembukuan

Untuk memastikan kepatuhan pada hukum anti-korupsi dan kebijakan perusahaan, semua transaksi bisnis harus secara baik diotorisasi, dan harus secara lengkap dan akurat dicatat dalam pembukuan, arsip, dan rekening kita.

Pembukuan dan arsip Fujitsu harus dipelihara dengan perincian yang memadai untuk secara akurat dan jujur mencerminkan transaksi dan penggunaan aset, termasuk mencatat pengukuran yang benar atas nilai dan periode waktu ketika transaksi terjadi.

Secara tersurat dinyatakan dilarang memasukkan entri palsu atau menyesatkan ke dalam pembukuan, arsip, dan rekening Perusahaan, termasuk entri yang tidak mencerminkan transaksi tidak semestinya (misalnya uang pelicin dan suap) dan/atau entri yang dipalsukan untuk menyamarkan suap dan/atau tidak memasukkan entri tentang pembayaran oleh atau kepada Perusahaan. Tidak ada pembayaran atas nama Fujitsu yang boleh disetujui atau dilakukan dengan perjanjian tersurat ataupun tersirat bahwa bagian pembayaran itu akan digunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan yang dideskripsikan oleh dokumen yang mendukung pembayaran tersebut. Selain itu, tidak boleh dibuat atau dipertahankan dana

atau aset yang bersifat rahasia atau tidak tercatat.

Kecuali keperluan kas kecil yang normal dan lazim, tidak diperbolehkan ada transaksi yang menggunakan uang kertas atau koin dan bukan transfer elektronik, cek, atau instrumen serupa dalam kaitannya dengan bisnis Fujitsu.

4. Pihak Ketiga

Setiap orang yang berbisnis melalui konsultan, perantara, subkontraktor, distributor, mitra, agen, atau pihak ketiga lainnya harus berusaha memastikan bahwa mereka juga mematuhi peraturan di atas. Baik perorangan maupun Fujitsu secara hukum dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga tersebut. Kita tidak boleh menggunakan pihak ketiga untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan menurut GBS atau Lampiran ini.

Kita tidak akan berbisnis dengan pihak ketiga, kecuali jika dan sampai uji tuntas yang sesuai dilakukan dan perjanjian tertulis ditandatangani oleh pihak-pihak. Perjanjian itu harus mencantumkan komitmen pihak ketiga untuk mematuhi, dan menunjukkan komitmennya terhadap, undang-undang anti-korupsi yang berlaku dan standar anti-korupsi Fujitsu.

Secara berkelanjutan kita akan waspada memantau kegiatan pihak ketiga. Permintaan pembayaran yang berlebihan, palsu, atau yang penjelasannya tidak memadai, subkontrak yang tidak lazim atau terlalu besar nilainya, dokumentasi yang tidak lazim atau tidak lengkap, serta penolakan atau tidak memberikan dokumentasi yang diminta dapat merupakan tanda Suap oleh pihak ketiga. Kita akan gigih menuntut dokumentasi atau justifikasi sebelum membayar pengeluaran, dan mempertanyakan setiap pengeluaran yang tidak lazim atau berlebihan. Karyawan harus memberi tahu Compliance atau Legal Department jika mencurigai pihak ketiga telah atau akan melakukan suap.

5. Pelatihan dan Kepatuhan

Fujitsu akan memberikan pelatihan berkala untuk menjelaskan dan menegaskan kembali pentingnya mematuhi kebijakan dan prosedur anti-korupsi Perusahaan. Kita juga akan mendistribusikan kepada karyawan dan pihak ketiga yang relevan, dan meminta dari mereka, surat pernyataan kepatuhan terhadap undang-undang anti-korupsi yang berlaku, dan kita akan menyimpan surat pernyataan itu di dalam arsip kita sekurang-kurangnya selama lima tahun.

Legal Department tersedia untuk menangani keraguan atau kekhawatiran tentang apakah suatu transaksi itu terlarang menurut kebijakan dan prosedur anti-korupsi Perusahaan atau undang-undang anti-korupsi yang berlaku.

Kebijakan Global tentang Kepatuhan pada Undang-Undang Anti-Monopoli & Persaingan

1. Latar Belakang

- Lebih dari 100 negara memiliki undang-undang persaingan. Undang-undang persaingan berlaku juga di luar batas pemerintahan.
- Pihak berwenang dalam urusan persaingan di seluruh dunia semakin agresif menyelidiki dan memperkarakan pelanggaran undang-undang anti-monopoli dan persaingan di seluruh dunia.
- Pelanggaran dapat berakibat dijatuhkannya denda besar kepada perusahaan, denda dan hukuman penjara kepada perorangan, serta gugatan pribadi.

2. Apa sajalah yang dilarang oleh undang-undang anti-monopoli dan persaingan?

Pada umumnya undang-undang persaingan melarang praktik bisnis yang menghambat perdagangan.

a) Perjanjian Pengaturan Harga Dilarang Keras.

Perjanjian di antara para pesaing yang berkaitan dengan harga atau semua faktor yang berkaitan dengan harga dilarang keras di seluruh dunia (termasuk, misalnya, syarat dan ketentuan penjualan, harga dalam katalog, diskon, rentang harga dan diskon, harga minimum, harga untuk pelanggan atau penawaran tertentu, stabilisasi harga, syarat kredit, alokasi pelanggan, volume produksi, atau pembatasan output). Perjanjian terlarang tidak harus dalam bentuk pernyataan, formal, atau didokumentasikan; undang-undang anti-monopoli dan persaingan melarang perjanjian pengaturan harga yang tersirat maupun perjanjian lisan. Selain itu, definisi tentang apa yang disebut perjanjian dapat ditafsirkan secara berbeda di berbagai negara dan kadang termasuk perbuatan yang lebih luas cakupannya daripada perbuatan di negara lain.

b) Pertukaran Informasi di Antara Pesaing Dilarang.

Selain perjanjian pengaturan harga, undang-undang anti-monopoli dan persaingan pada umumnya melarang pertukaran informasi komersial non-publik di antara para pesaing yang menyangkut berbagai jenis informasi berikut ini tentang produk dan jasa mereka:

- Strategi harga dan penentuan harga di waktu mendatang;
- Status dan strategi tentang negosiasi dengan pelanggan;
- Diskon, skema insentif penjualan, rabat;
- Perkiraan pasar internal;
- Rencana belanja modal, perkembangan produk baru, teknologi baru; dan
- Tingkat inventaris, kapasitas dan penggunaan produksi, jumlah penjualan atau pesanan di waktu mendatang.

Pertukaran informasi di antara para pesaing dapat menimbulkan masalah serius yang menyangkut undang-undang anti-monopoli dan persaingan, meskipun tidak ada perjanjian pengaturan harga. Bahkan sekadar menerima informasi komersial non-publik dari pesaing pun dapat menimbulkan risiko besar yang menyangkut anti-monopoli.

3. Interaksi dengan Pesaing

Interaksi dengan para pesaing memang riskan dan sebaiknya dihindari, kecuali dalam keadaan tertentu manakala interaksi itu memang perlu untuk kepentingan bisnis yang sah. Misalnya, berbagai forum, seminar, lokakarya, dan kelompok praktik terbaik yang berfokus pada sektor industri, kelompok standar yang memiliki penasihat anti-monopoli, serta pameran dagang dan rapat asosiasi perdagangan yang sah

biasanya mengharuskan adanya interaksi dengan para pesaing, namun tetap menunjang sasaran-bisnis yang penting. Akan tetapi, pertemuan semacam itu juga membuka peluang terjadinya komunikasi yang tidak menunjang kepentingan-bisnis yang sah, namun jelas menimbulkan risiko anti-monopoli dan persaingan.

Pada dasarnya, karyawan yang berinteraksi dengan pesaing – untuk alasan apa pun, dalam lingkungan apa pun, bahkan sekalipun pesaing itu sahabat, mantan sejawat, atau anggota keluarganya, tidak boleh membicarakan informasi komersial yang peka. Tidak boleh ada perjanjian atau pertukaran informasi tentang persaingan.

Jenis interaksi tertentu dengan pesaing menimbulkan risiko sangat besar karena membuka peluang terjadinya perjanjian atau pertukaran informasi terlarang. Bahkan, meskipun tidak dilakukan perbuatan terlarang, jenis interaksi tertentu dengan pesaing dapat mengesankan dilakukannya perbuatan tidak patut, seperti:

- Pertemuan informal, acara kumpul-kumpul para pesaing, atau kunjungan persahabatan ke atau oleh pesaing;
- Acara kumpul-kumpul sosial berulang dengan pesaing (termasuk kegiatan seperti golf, makan malam, klub); atau
- Hubungan langsung seperti pesan email, SMS, atau panggilan telepon.

Bahkan ketika interaksi dengan para pesaing dimulai hanya sebagai kontak sosial, lama-kelamaan interaksi berulang dapat menyebabkan hubungan antara kedua belah pihak berubah dan mengakibatkan dilakukannya perbuatan terlarang dan pertukaran informasi seperti yang dijelaskan di atas.

Karyawan Fujitsu Group harus memberi tahu anggota Bagian Kepatuhan dan Hukum yang tepat jika mereka sering melakukan interaksi jenis apa pun dengan pesaing.

4. Hukuman Sangat Berat untuk Pelanggaran

Hukuman untuk perbuatan anti-monopoli sangatlah berat. Pelanggaran dapat berakibat dijatuhkannya denda besar kepada perusahaan, denda dan hukuman penjara kepada perorangan, dan gugatan pribadi. Perbuatan anti-monopoli tidak pernah bermanfaat dari segi keuangan, baik bagi perusahaan ataupun karyawan.

Misalnya:

- Orang di berbagai negara dijatuhi hukuman penjara karena terlibat atau berperan dalam pelanggaran undang-undang anti-monopoli.
- Pihak berwenang penegakan persaingan di seluruh dunia menjatuhkan denda besar yang semakin meningkat kepada perusahaan yang terlibat melakukan perbuatan anti-persaingan. Beberapa operator ponsel didenda €50 juta karena berpartisipasi dalam satu kali pertemuan yang membicarakan pertukaran informasi persaingan. Sejumlah perusahaan didenda ratusan juta dolar karena pola perbuatan yang melibatkan pertukaran informasi dan perjanjian anti-persaingan.
- Temuan yang menunjukkan bahwa perusahaan melakukan perbuatan anti-persaingan dapat menimbulkan dampak serius dari segi operasional, termasuk kesulitan memperoleh kontrak dengan pemerintah, tercorengnya nama baik, dan hilangnya kepercayaan dari pelanggan dan pemasok.

5. Menanggapi secara Patut ketika Masalah Muncul

Agar tidak menimbulkan risiko bagi diri Anda ataupun perusahaan, ikutilah sejumlah peraturan di bawah ini:

- Jangan sekali-kali membuat perjanjian dengan pesaing tentang harga atau syarat penjualan apa pun (kecuali sebagai bagian dari kegiatan komersial bersama yang sah yang sudah ditinjau dan disetujui oleh Bagian Hukum)
- Jangan sekali-kali memberi pesaing informasi komersial yang peka tentang produk, harga, penjualan, diskon, produksi, bisnis, atau pelanggan kita.
- Jika Anda menerima informasi semacam itu dari pesaing, atau jika Anda didekati oleh pesaing yang berupaya untuk bertukar informasi semacam itu, segera laporkan hal ini ke Bagian Hukum atau Bagian Kepatuhan.
- Selalu pastikan bahwa sumber informasi tentang pesaing sudah jelas ketika Anda menerima informasi seperti itu dari dealer, pelanggan, atau sumber hukum lainnya.
- Jangan sekali-kali bertanya kepada pesaing tentang kebenaran informasi yang diperoleh dari sumber publik atau pelanggan.
- Berhati-hatilah dalam pertemuan yang dihadiri para pesaing dan tinggalkan pertemuan jika diskusinya meragukan.

Secara proaktif Anda wajib melaporkan setiap potensi masalah ke Bagian Kepatuhan atau Bagian Hukum pada saat potensi masalah itu muncul. Kebanyakan negara memiliki program yang memberikan perlindungan hukum yang signifikan kepada perusahaan pertama yang melaporkan masalah yang mungkin muncul (program "amnesti" atau "keringanan"). Jika masalah muncul, kami mungkin dapat meredam dampak pada perusahaan dengan segera menangani situasi. Jika kita tidak melakukannya, para pesaing kitalah yang mungkin melakukannya.

